

**IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SAFFIRA WAHYU SEPTIANA

C100160305

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SAFFIRA WAHYU SEPTIANA

C100160305

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a final flourish.

(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**




OLEH

SAFFIRA WAHYU SEPTIANA

C100160305

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 18 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dosen Penguji:

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Mutimatun Niami, S.H., M. Hum
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Syaifuddin Zuhdi, S. HI., M. HI.
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzafah Dimvati, S.H., M.Hum.

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya

Surakarta, 3 Juli 2020

Penulis



SAFFIRA WAHYU SEPTIANA

C100160305

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pacitan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, UU nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

Kata kunci: efektifitas, uu nomor 16 tahun 2016, batas usia pernikahan

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the regulation of Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age of marriage has been implemented and can be effectively accepted in society. This research is a type of normative-empirical legal research. The study was conducted in KUA Pacitan District. The data source use primary and secondary data. The method of data analysis using qualitative methods. The result of research showed: first, Law Number 16 of 2019 has not been effectively implemented, there are still many marriages that occur under the age of the provisions of the law. Second, KUA has made efforts such as socialization to the community but there are still many factors that hamper KUA's efforts to implement Law Number 16 of 2019 effectively.

Keywords: effectiveness, law number 16 of 2019, age limited for marriage

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan (Wasman, 2001).¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sehingga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selama-lamanya, Dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya (Eoh, 2001).

Melihat unsur-unsur diatas, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya (Manuaba, 1996).

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nonor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945 (Mulia, 2006).

Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi (Kartikawati, 2014). Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.⁸

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan (Kumedi, 2018). Dari uraian diatas, makan penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

Permasalahan difokuskan kepada bagaimana implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pacitan apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Serta upaya dan kendala KUA Kecamatan Pacitan dalam menerapkan undang-undang yang bersangkutan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan, dan efek dari penerapannya. Serta kendala-kendala yang dihadapi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menegakkan peraturan mengenai batas minimal perkawinan adalah 19 tahun. Agar kedepannya kendala tersebut dapat diatasi dan dapat menjalankan peraturan dengan maksimal.

2. METODE

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Yang mana data primer dari KUA Kecamatan Pacitan serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi lapangan ke KUA Kecamatan Pacitan maupun studi kepustakaan. Yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Batas Usia Minimal 19 Tahun Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pacitan

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pacitan, sangat diperlukan mengenai peningkatan efisiensinya dalam hal pendewasaan usia perkawinan di masyarakat, seperti melalui sosialisasi. Apabila dari pihak KUA tidak ada langkah-langkah yang membuat undang-undang efisien secara fungsional dan dari masyarakat sendiri tidak mau tahu tentang aturan batas minimal perkawinan, hal itu hanya

akan menaikkan grafik angka pernikahan dini di Kecamatan Pacitan. Mengapa demikian, yang semula pernikahan terjadi di usia 17 atau 18 tahun bukan merupakan pernikahan dini, namun setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 pernikahan usia tersebut masuk dalam kategori pernikahan dini¹⁴ Karena apabila usia perkawinan terlalu rendah akan memberikan dampak buruk bagi negara, yaitu menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk (Syarifudin, 2006).

Jika melihat data di lapangan, banyak perkawinan yang terjadi selama bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 adalah sebanyak 292. Dari jumlah tersebut, yang masuk dalam perkawinan dibawah umur adalah 9 kasus. Berikut rinciannya:

Tabel 1. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Oktober 2019 (Mulai tanggal 15)

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	FS	DTR	25	18	SLTP	SLTP	SD	SD	SD	SD
2	AT	JH	25	18	SMA	SMA	SD	SD	SD	SD
3	RA	NAF	23	17	SLTP	SLTP	SD	SD	SD	SD

Tabel 2. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Desember 2019

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	IB	RM	18	16	SD	SLTP	-	SD	-	-
2	BS	VC	16	14	SLTP	SD	SLTP	SLTP	SLTP	SD

Tabel 3. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Januari 2020

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	A	CRP	23	18	-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Kasus Pernikahan Dibawah Umur Maret 2020

No	Nama Catin		Umur		Pendidikan		Pendidikan orang tua L		Pendidikan orang tua P	
	L	P	L	P	L	P	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1	ADP	WT	19	18	SD	SMA	SD	SD	SD	SD
2	RS	IC	27	18	SLTP	SD	-	SD	SLTA	-
3	RM	WF	17	17	SLTP	SLTP	SLTA	SLTA	-	S1

Sembilan pasang mempelai tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan karena kendala kurangnya salah satu persyaratan menikah yaitu kurang umur. Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka 9 pasang mempelai tersebut harus meminta izin dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Pacitan untuk mendapat putusan. Yang mana putusan tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan.

Terkait laporan usia perkawinan, jika dibandingkan dengan data jumlah perkawinan dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2019, yakni selama 9 bulan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan maka jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi masih banyak dilakukan pada saat sudah diberlakukan UU Nomor 16 Tahun 2019. Berikut data laporan usia pengantin pada bulan Januari sampai dengan September 2019:

Tabel 5. Data Laporan Usia Pengantin pada Bulan Januari
Sampai dengan September 2019

No	Kelurahan/ Desa	Usia Pengantin							
		Laki-laki				Perempuan			
		-19	19-21	21-30	30+	-16	16-21	21-30	30+
1	Kel. Sidoharjo	3	3	31	17	-	6	36	12
2	Kel. Ploso	-	2	23	18	-	1	30	12
3	Ds. Kembang	-	-	11	6	-	3	9	5
4	Ds. Sukoharjo	-	-	6	5	-	-	9	2
5	Ds. Kayen	-	-	8	1	-	-	8	1
6	Ds. Sirnobojo	-	2	17	15	-	3	25	6
7	Ds. Arjowinangun	-	-	12	5	-	1	13	3
8	Kel. Baleharjo	-	-	12	1	-	2	10	1
9	Ds. Bangunsari	-	-	13	8	-	-	15	6
10	Ds. Sedeng	-	-	9	3	-	3	5	4
11	Ds. Sumberharjo	-	1	1	3	-	2	1	2

12	Ds. Pucangsewu	1	-	13	6	-	2	12	6
13	Kel. Pacitan	-	1	12	6	-	1	11	7
14	Ds. Tanjungsari	1	4	11	12	-	7	15	6
15	Ds. Menadi	-	1	5	5	-	2	6	3
16	Ds. Mentoro	-	-	11	6	-	1	12	4
17	Ds. Purworejo	-	-	5	4	-	1	6	2
18	Ds. Nanggungan	-	-	10	1	-	1	9	1
19	Ds. Widoro	-	-	10	2	-	1	10	1
20	Ds. Semanten	-	-	3	1	-	1	2	1
21	Ds. Sambong	1	3	10	3	-	6	9	2
22	Ds. Bolosingo	-	2	10	2	-	3	7	4
23	Ds. Banjarsari	-	1	6	4	-	3	7	1
24	Ds. Ponggok	-	1	9	3	-	6	5	2
25	Ds. Tambakrejo	-	-	8	4	-	-	10	2
JUMLAH		6	21	266	141	-	56	282	96

Setelah melihat tabel laporan usia perkawinan pada bulan Januari sampai September 2019 (selama 9 bulan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan) dari total perkawinan sebanyak 434 pasang, yang masuk dalam perkawinan dibawah umur hanya sebanyak 6 kasus. Sedangkan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 (selama 6 bulan setelah diterapkan UU Nomor 16 Tahun 2019) dari total 292 perkawinan yang masuk perkawinan dibawah umur sebanyak 9 kasus. Hal itu berarti diterapkannya UU nomor 16 Tahun 2019 akan meningkatkan permohonan dispensasi perkawinan.

Dan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilakukan saat diterapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya kasus pernikahan dibawah umur pada saat UU Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan daripada saat belum diterapkan. Karena dengan diterapkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 saat ini, hanya akan meningkatkan grafik jumlah pernikahan dibawah usia jika tidak diimbangi dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya batasan usia perkawinan.

3.2 Upaya KUA Agar Implementasi Batas Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dilaksanakan Secara Efektif

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama islam, di wilayah kecamatan yang dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara

langsung berhadapan dengan masyarakat. karena itu wajar bila keberadaan KUA di nilai sangat penting.

Untuk menunjang agar UU Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan secara efektif, KUA dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui perangkat-perangkat desa. Tetapi dalam melakukan sosialisasi mustahil jika tidak ada hambatannya. Banyak sekali hambatan yang dihadapi penyuluh antara lain banyaknya pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi dari KUA karena keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya yang menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah. Walaupun banyak faktor yang menghambat terselenggaranya UU Nomor 16 Tahun 2019 efektif, KUA serta masyarakat harus bekerjasama dalam menghentikan maraknya kasus pernikahan dini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pacitan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan dibawah usia yang ditentukan undang-undang yaitu salah satunya dengan sosialisasi. Tetapi dalam melakukan

sosialisasi tersebut masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah sosialisasi yang tidak dapat dilakukan maksimal karena kurangnya jumlah penyuluh. Bagaimana tidak, satu orang penyuluh harus bertanggungjawab atas tiga sampai dengan empat desa, sehingga sulit untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Selain itu banyak faktor eksternal lain yang menghambat kinerja KUA, antara lain faktor pergaulan bebas, orang tua, pendidikan dan ekonomi.

4.2 Saran

Kepada KUA lebih giat dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut dengan dalih tidak mengetahui adanya batas minimal perkawinan 19 tahun.

Kepada masyarakat, khususnya para orang tua harusnya lebih peduli dengan masa depan anaknya. Orang tua jangan sampai lengah dalam mendidik. Pentingnya kesadaran akan bahaya perkawinan dini juga harus diterapkan dalam keluarga. Dan masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan anak dibawah umur di lingkungan mereka.

Kepada generasi muda hendaknya berfikir fokus untuk masa depan terlebih dahulu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan sebaiknya memilih lingkungan pergaulan yang positif sehingga dapat mengasah potensi yang kita miliki. Sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamilah, Reni Kartikawati. (2014). *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12 diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.59 WIB
- Eoh, O.S. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kumedi, Ja'far A. (2018). *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-undangan tentang Batas Usia Perkawinan)*. Tesis UIN Raden Intan Lampung, hlm. 222 pada <http://repository.radenintan.ac.id/3624/> diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.10 WIB
- Manuaba, Ida Bagus Gde. (1996). *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku

Kedokteran.

- Mulia, Siti Musdah. (2006). *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan*, Jakarta: YOI.
- Pohan, Nazli Halawani. (2017). *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2017.
- Sumiarni, Endang. (2004). *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- Wasman, Wardah Nuroniyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.